

WARGA NEGARA INDONESIA PENDUKUNG ISIS DALAM PERSPEKTIF GLOBALISASI VERSUS NASIONALISME

Ambarwati

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jayabaya, Jakarta

ambarwati_hi@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini menguraikan bagaimana globalisasi telah secara masif menggerus (undermine) identitas dan nasionalisme sebagian warganegara Indonesia. Hal ini berhubungan dengan bergabungnya sekelompok WNI menjadi pendukung ISIS di Iraq dan Suriah menjadi polemik di dalam negeri Indonesia baru-baru ini. Nasionalisme Indonesia yang telah dibangun sejak 1945 berada dalam ancaman ketika serangan globalisasi berkelindan (intertwined) dengan persoalan-persoalan domestik yang menyebabkan alienasi dan marginalisasi sekelompok masyarakat.

Kata kunci: Globalisasi, ISIS, Nasionalisme, alienasi dan marginalisasi

Abstract

This paper describes how globalization has massively undermined identity and nationalism of many Indonesian citizens. It is related with a group of Indonesian citizens who join the ISIS in Iraq and Syria and it becomes polemics in Indonesia recently. Indonesian nationalism, builded since 1945, is under attacked when globalization intertwined with domestic problems makes groups of people in Indonesia alienated and marginalized.

Keywords : Globalization, ISIS, Nationalism, alienated and marginalized

PENDAHULUAN

Pada Maret 2019 pasukan gabungan milisi demokrat Suriah (SDF) yang didukung Amerika berhasil menggempur pertahanan ISIS (*Islamic State of Iraq anf Syria*) di kota Baghuz, Suriah Timur pada awal Maret 2019. (BBC News Indonesia, 11 Maret 2019, www.bbc.com) Kota Baghuz dianggap sebagai pusat kekhalfahan Islam yang selama ini diperjuangkan untuk didirikan oleh ISIS. Setelah kejatuhan Baghuz, pasukan Amerika terus memburu pimpinan ISIS, Abu Bakar al Baghdadi. Pimpinan ISIS tersebut akhirnya tewas di kota Idlib, Suriah Utara pada akhir November 2019. Kejatuhan kota Baghuz dan terbunuhnya Baghdadi dianggap sebagai berakhirnya petualangan kelompok pemberontak militan yang merupakan pecahan dari kelompok teroris al Qaida pimpinan Usamah bin Ladin.

Ketika kota Baghuz diserbu koalisi pasukan SDF dan tentara Amerika, ada sekitar 6.500 warga sipil dan tentara militan serta simpatisan ISIS yang ada di tenda-tenda hunian di kota tersebut. Mereka berasal dari Suriah, Irak, dan dari negara-negara lain di seluruh dunia, termasuk kurang lebih 600 warga negara Indonesia (WNI). Setelah kejatuhan ISIS dan berakhirnya mimpi kekhalfahan, para pendukung ISIS dipindahkan ke kamp-kamp pengungsian di Al Roj, Al Hol dan Ainisa. Banyak diantara mereka yang ingin kembali ke negara asal. Demikian juga dengan sekitar 600 WNI pendukung ISIS yang terdiri dari 113 perempuan, 100 anak-anak dan sisanya adalah pria dewasa.

Isu kepulangan para WNI pendukung ISIS ini tak pelak menimbulkan polemik dikalangan elit dan masyarakat. Presiden Joko Widodo telah dengan tegas menolak

kepulungan para WNI pendukung ISIS, namun masih akan mengadakan rapat terbatas untuk membuat keputusan final. Sedangkan Wakil Ketua DPR-RI Fadli Zon dan ketua LSM Setara Institute, Hendardi menyatakan bahwa sebaiknya pemerintah menerima mereka dengan alasan kemanusiaan. Posisi moderat diwakili oleh Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum ICMI dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menyarankan agar paspor WNI yang tergabung ISIS dicabut. Apabila mereka ingin kembali menjadi warga negara Indonesia, mereka harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Kebijakan tersebut dianggap sebagai bentuk pembinaan dan untuk menimbulkan efek jera. (Tempo.co, 5 Februari 2020)

Pro dan kontra tentang WNI pendukung ISIS dihubungkan erat dengan persoalan nasionalisme mereka. Pertanyaan-pertanyaan bermunculan seputar bagaimana mereka bisa diterima kembali menjadi WNI ketika mereka telah dengan sukarela meninggalkan negaranya dan berjuang menjadi kombatan untuk mendirikan negara baru. Bagaimana negara bisa kembali mengakui mereka sebagai warga negara ketika mereka dengan sengaja merobek paspor Indonesia dan menyatakan sumpah setia terhadap otoritas yang berbeda. Guru Besar hukum internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana mengemukakan bahwa mereka yang telah bergabung dengan ISIS secara otomatis gugur kewarganegaraannya, kecuali anak-anak mereka. (CNN Indonesia, 8 Februari 2020). Sedangkan juru bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi mengemukakan bahwa status WNI tidak hilang meskipun para WNI telah bergabung dengan ISIS dan bahkan sebagian telah membakar paspor mereka. (CNN Indonesia, 7 Februari 2020).

Fenomena seorang/sekelompok warganegara dengan sadar dan sengaja meninggalkan negaranya untuk mendukung berdirinya entitas politik baru menjadi fenomena yang menarik untuk ditelaah. Ini bukan fenomena migrasi biasa sebagaimana kelompok mahasiswa pergi untuk tugas belajar, atau kelompok pekerja (TKI/TKW) pergi ke negara lain untuk bekerja. Para WNI pendukung ISIS ini dengan sengaja meninggalkan wilayah RI, bahkan melepas atribut kewarganegaraannya dengan harapan bisa bergabung menjadi warganegara

kekhalfahan Islam Iraq dan Suriah. Sebagian dari mereka telah disumpah setia dan bersedia menjadi kombatan demi berdirinya kekhalfahan model Pan Islamisme seperti yang pernah digaungkan pemimpin Mesir Gamal Abd al-Nasser.

Ide-ide untuk mendirikan sebuah pemerintahan dunia yang berlandaskan agama sejak akhir abad 20 telah menarik minat individu-individu dari berbagai belahan dunia. Mereka rela menempuh perjalanan panjang dan penuh resiko untuk bisa memasuki wilayah pertempuran di Iraq dan Suriah yang menjadi basis negara Islam Iraq dan Suriah. Ide-ide seperti ini dengan mudah bisa dipelajari melalui internet serta kontak-kontak langsung yang pada masa sekarang sangat mudah dilakukan karena semakin mudahnya sarana untuk komunikasi dan mobilisasi.

Tulisan ini akan menelaah tentang fenomena globalisasi ide-ide yang menjadi tantangan bagi nasionalisme warganegara. Pertanyaan yang menjadi fokus tulisan ini adalah bagaimana globalisasi ide-ide/gagasan telah menggerus (*undermine*) dan menjadi ancaman bagi nasionalisme. Selain itu, menarik juga untuk menelaah bahwa globalisasi adalah fenomena tak terelakkan yang juga membawa hal-hal positif untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Nasionalisme dan Perkembangannya

Konsep nasionalisme merupakan gagasan yang telah tua dan menjadi dasar untuk bernegara. Konsep ini secara teoritis dipahami secara luas, tidak hanya rasa cinta terhadap tanah air saja tetapi juga sejauh mana warga negara bersedia berkorban untuk negaranya. Dilacak dari sejarah Eropa nasionalisme modern, menurut Hans Kohn muncul di Eropa pada abad ke 17 dan 18 terutama di Inggris dan Perancis. Inggris dianggap sebagai bangsa modern pertama dimana nasionalisme, patriotisme tumbuh bersamaan dengan gagasan kebebasan individu dan partisipasi umum dalam kehidupan publik. Sedangkan di Perancis, nasionalisme muncul dengan lebih hebat, lebih romantis dan secara etnis lebih homogen dibanding nasionalisme versi Anglo Saxon. Napoleon Bonaparte mentransformasikan

gagasan nasionalisme dan patriotisme Perancis dalam bentuk kebijakan ekspansionis. (Coulombis dan Wolfe, 1990, h.65). Nasionalisme ala Perancis ini dianggap sebagai tonggak perubahan dari bentuk kesetiaan kepada penguasa/raja ke bentuk kesetiaan kepada negara. Bentuk nasionalisme modern mengalami pertumbuhan secara evolusi maupun revolusi. Pertumbuhan secara evolusi seperti terjadi di Inggris dimana nasionalisme demokratis ditandai dengan semakin meningkatnya kekuasaan parlemen (dan rakyat) dan semakin berkurangnya kekuasaan raja. Sedangkan yang terjadi di Perancis dan Amerika adalah terbentuknya nasionalisme secara revolusioner. Dari Eropa dan Amerika inilah, nasionalisme menyebar ke seluruh dunia.

Secara konseptual, nasionalisme menempatkan rasa cinta, kesetiaan dan penghormatan kepada bangsa diatas golongan dan individu-individu. Konsep *nation*, merujuk pada sekelompok individu-individu yang memenuhi kualitas sebagai suatu bangsa. Menurut Rourke, untuk disebut sebagai suatu bangsa ada tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu *similarities, feeling of community* dan *a desire to be separate* (secara politik independen atau otonom). (Rourke, 1989, h.133). Hans Kohn sebagaimana dikutip Padelford dan Lincoln melihat nasionalisme sebagai “perasaan” yang mencerminkan kesadaran nasional dan kesetiaan kepada satu bangsa. (Padelford dan Lincoln, 1962, h.145). Disini individu-individu menyerahkan kesetiannya dan mengidentifikasi kesejahteraan dengan suatu bangsa tertentu. Nasionalisme mengandung unsur-unsur psikologis dan unsur politis, dalam arti yang lebih konkrit, kekuasaan politik tercermin dalam negara, namun keberlangsungan hidup negara tergantung pada sejauhmana bangsa tersebut secara psikologis dipersatukan. (Bloom, 1990, h.56).

Bahkan Georg William Friedrich Hegel sebagaimana dikutip oleh Coulombis dan Wolfe mendefinisikan nasionalisme dalam arti biologis. Menurut Hegel, nasionalisme adalah bakat dan semangat suatu bangsa, dan dengan kedua hal itu bangsa tersebut memiliki kualitas organisme yang besar, kolektif, hidup dan tumbuh. Bagian-bagian organisme tersebut (seperti individu-individu, kelompok, daerah,

partai politik, dsb) harus tunduk pada organisme tersebut. Negara adalah perwujudan dari keinginan dan tujuan bangsa. Individu-individu adalah “alat” negara yang nilainya akan diukur melalui kontribusi mereka bagi kelangsungan hidup organisme negara tersebut. (Coulombis dan Wolfe, 1990, h.66-67).

Definisi-definisi diatas memang masih mengundang perdebatan, misalnya persoalan antara “bangsa” dengan “kelompok etnis” adalah dua hal yang sulit untuk dibedakan. Di Kanada misalnya, ada kelompok French-Canadian yang merupakan mayoritas penduduk di wilayah Quebec yang cenderung eksklusif, dan secara kultur berbeda dengan mayoritas penduduk Kanada keturunan Inggris dan Amerika.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, gelombang nasionalisme melanda negara-negara bekas jajahan di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Bentuk nasionalisme yang melanda negara-negara di tiga kawasan ini berbeda dengan nasionalisme yang muncul di Inggris dan Perancis. Di Inggris dan Perancis, tumbuhnya nasionalisme adalah karena dorongan untuk membebaskan diri dari kekuasaan absolut raja-raja Eropa. Sedangkan nasionalisme negara-negara baru tersebut adalah nasionalisme untuk membebaskan bangsanya dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa dan Amerika.

Ketika negara-negara Dunia Ketiga tengah berbenah untuk mencapai kesejahteraan dalam batas-batas geopolitis mereka, banyak diantara negara-negara tersebut mengalami ancaman kedaulatan baik ancaman internal maupun eksternal. Ancaman-ancaman bagi kedaulatan nasional menurut Coulombis dan Wolfe ada tiga bentuk yaitu : kemajuan teknologi militer, munculnya organisasi-organisasi supranasional dan munculnya gerakan-gerakan transnasional yang bersifat ideologis, religius, fungsional dan politis. (Coulombis dan Wolfe, 1990, h.72-73). Sedangkan Kenichi Ohmae melihat bahwa aktifitas perekonomian global telah menjadi ancaman bagi peranan negara bangsa. Dalam arti fisik, aktifitas-aktifitas ekonomi global telah melemahkan makna batas-batas geografis suatu bangsa. Dan dalam arti psikologis, aktifitas tersebut juga telah melampaui makna

atau label bangsa atau negara. Misalnya, kita jarang mempersoalkan nasionalisme rakyat Hongkong, namun secara ekonomi mereka hidup lebih makmur. Mengaburnya batas-batas wilayah negara, menurut Ohmae adalah akibat mengalirnya arus “empat i”. Pertama adalah *investasi*, dimana investasi negara-negara maju bisa mengalir ke negara-negara berkembang dengan leluasa. Kedua, *industri*, yaitu semakin banyaknya industri-industri dari berbagai perusahaan multinasional yang beroperasi melintasi batas-batas wilayah negara. Ketiga adalah *informasi*, yang memungkinkan pola interaksi semakin cepat dengan jaringan ke seluruh dunia. Dan keempat adalah konsumen-konsumen *individual* yang akan membeli produk-produk terbaik tanpa terikat pada label kebangsaan. (Ohmae, 1995, h. 11-13).

Berakhirnya Perang Dingin pada akhir dasawarsa 1990an, dan perkembangan mutakhir teknologi komunikasi dan transportasi, sedikit banyak telah mengubah konsepsi tentang loyalitas dan rasa cinta tanah air sebagaimana dikemukakan Hans Kohn diatas. Munculnya entitas politik supra nasional seperti Uni Eropa, organisasi-organisasi transnasional dan gelombang “empat i” nya Kenichi Ohmae adalah beberapa fenomena globalisasi yang telah menyapu hampir seluruh negara-negara didunia dalam berbagai tingkatan.

2. *Globalisasi Sebagai “Natural Phenomenon”*

Globalisasi bukan suatu hal baru dalam interaksi umat manusia, karena secara alamiah pada dasarnya manusia ingin berhubungan dengan manusia lainnya tanpa dibatasi sekat-sekat geografis, politis, budaya. Bahwa pada dasarnya manusia akan menghadapi situasi alamiah yang sama, yaitu persoalan *scarcity of collective goods*. Masalah kelangkaan sumber-sumber kehidupan mendorong manusia untuk berkelana ke seluruh penjuru dunia untuk mencari jaminan keberlangsungan hidup mereka. Richard Falk dalam bukunya *This Endangered Planet*, sebagaimana dikutip oleh Joseph S.Nye mengemukakan bahwa dalam kondisi semakin langkanya sumber-sumber kehidupan manusia akan mendorong manusia saling bekerjasama. (Nye, 2000, h. 209).

Bukti politis globalisasi kuno adalah pembentukan imperium-imperium sejak masa Yunani Kuno seperti Kerajaan Lydia meluaskan kekuasaan hingga ke Asia Minor, Imperium Assyria dan Persia di Timur Tengah. Dan Kekaisaran Macedonia dibawah Great Alexander yang telah meluaskan wilayahnya hingga ke Sungai Indus di Asia Tengah. (Alcock, 1998, h. 10-11). Globalisasi kuno (*archaic globalization*) berlangsung hingga kira-kira tahun 1500, dimana dalam periode ini termasuk periode Byzantium, Dinasti Tang di China, dan berbagi khalifah Islam di Timur Tengah. (Magenda, 2007, h. 556-557).

Tahap berikutnya setelah globalisasi kuno adalah “proto globalisasi” yang berlangsung antara 1500-1800 dengan bangkitnya imperium-imperium Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris dan imperium Islam seperti Turki Ottoman dan Kekaisaran Moghul di India. Tahap globalisasi modern dimulai sekitar abad 19, dengan mulai tumbuhnya negara bangsa (*nation-state*) dan maraknya multinational corporation (MNC). Pada tahap ini kekuatan global utama adalah Inggris, dan kekuatan yang mulai bangkit adalah Amerika, Jerman dan Jepang. Dan tahap terakhir adalah globalisasi pasca Perang Dunia II, dimana globalisasi muncul sebagai fenomena yang kompleks dan bahkan tumbuh secara paradoksal. (Magenda, 2007, h. 557-559).

Globalisasi modern berkaitan dengan dinamika modernitas dan konsep yang merujuk pada dunia yang semakin mengecil (*shrinking the world*) dan meningkatnya kesadaran manusia mengenai masalah-masalah dunia secara keseluruhan. (Beynon dan Dunkerley, 2000, h. 42-43). Konsep ini melibatkan masalah perkembangan teknologi komunikasi, kemudahan transportasi hingga keleluasaan pergerakan barang, jasa, manusia beserta gagasan-gagasannya ke berbagai penjuru dunia dan dalam jaringan-jaringan internasional. (Prasetyono, 1996, h. 233). Dari hal-hal demikianlah berkembang konsep globalisasi ekonomi, globalisasi politik, globalisasi sosial dan budaya. Berbagai dimensi globalisasi inilah yang pada gilirannya menimbulkan paradoks atau dilema, terutama bagi negara-negara yang baru merdeka yang masih mengalami berbagai persoalan internal.

Muncul berbagai pandangan terhadap fenomena globalisasi. James J. Spillane melihat ada tiga kelompok yang melihat globalisasi secara berbeda, yaitu kelompok *skeptis*, kelompok *hyperglobalis* dan kelompok *transformatif*. Kelompok *skeptis* melihat bahwa globalisasi bukanlah hal baru, karena globalisasi sudah terjadi sejak abad ke 14. Kelompok *hyperglobalis* melihat bahwa globalisasi telah mengubah dunia secara radikal dan menghancurkan kebudayaan-kebudayaan lokal. Sedangkan kelompok *transformatif* menganggap perbedaan globalisasi sejak zaman ahulu hingga sekarang hanyalah masalah kecepatan (*velocity*), intensitas (*intensity*) dan ektensitasnya. (Spillane, 2002, h. 201).

Dilihat dari aspek politik, globalisasi direspon dengan sikap negatif maupun positif. Kelompok negatif melihat globalisasi dengan sinis karena dua hal, yaitu : pertama, proses globalisasi membawa internasionalisasi dan penyebaran nilai-nilai dan pemikiran demokrasi, termasuk didalamnya masalah HAM. Bagi negara-negara berkembang (seperti Indonesia) hal ini berkaitan langsung dengan masalah keabsahan negara dan segala implikasinya bagi hubungan ekonomi dan politik di tingkat nasional dan internasional. Kedua, globalisasi menyebabkan berkurangnya kemampuan negara untuk mengontrol dan mempertahankan loyalitas individu warganegaranya. (Prasetyono, 1996, 237-239). Sedangkan bagi kaum liberalis, globalisasi membawa makna positif sebagaimana yang diwakili oleh Francis Fukuyama, bahwa dengan kemenangan ideologi liberalis atas komunis, maka telah berakhir persaingan ideologi. Dengan demikian fasisme, komunisme dan monarkhi akan ditinggalkan dan demokrasi liberal adalah bentuk terakhir yang bisa diadopsi secara universal. (Beynon dan Dunkerley, 2000, h. 10).

Dalam bidang ekonomi, globalisasi membuat negara menjadi sulit untuk mempertahankan kebijakan ekonomi yang independen dan otonom. Negara-negara yang mengadopsi norma-norma liberal yang ditawarkan oleh globalisasi membuat intervensi pemerintah dalam aspek ekonomi sulit dilakukan dan akhirnya menjadi kebijakan

yang kurang populer. Hal ini dikarenakan adanya gejala yang disebut *internationalization of state* yang membuat kebijakan-kebijakan nasional harus disesuaikan dengan tekanan atau tuntutan internasional. (Beynon dan Dunkerley, 2000, h. 11).

Globalisasi modern abad 20 menyebar secara luas dan cepat karena pengaruh teknologi mikro prosesor serta teknologi satelit atau yang dikenal sebagai revolusi 4.0. Pada tahap ini pergerakan manusia, barang, jasa dan ide-ide tidak lagi terhalang oleh batas-batas kedaulatan negara (*borderless society*). Internet menjadi “kebutuhan pokok” baru di seluruh penjuru dunia sebagai sarana untuk berbagi informasi. Beberapa negara seperti Iran dan Brunei Darrussalam dan juga Indonesia mencoba untuk membatasi akses internet bagi warganegaranya. Namun mayoritas masyarakat di seluruh dunia sudah terjangkit virus internet selama 24 jam sehari.

Pada era globalisasi modern inilah gerakan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) muncul setelah Amerika berhasil menghancurkan gerakan Al Qaida. Mereka diuntungkan dengan adanya internet dan kemudahan komunikasi dan mobilitas. Seperti dikemukakan Lutz dan Lutz :

“Globalisation has had an additional effect on the prevalence of terrorism and the techniques used. The presence of modern communications and transportation has provided opportunities for violent organizations. to learn from each other, to communicate with members in distant locations and to reach out to possible recruits. It also provides greater opportunities for violent groups to attempt to influence external actors with their attacks. (Lutz dan Lutz, 2015, h. 29-30)

Terlepas dari campur tangan Amerika dalam hal munculnya ISIS, organisasi ini awalnya menarik bagi anak-anak muda Sunni di Iraq dan Suriah. Iraq dan Suriah adalah dua negara yang tercabik-cabik oleh perang internal dan campur tangan negara-negara luar.

Organisasi ini merupakan sempalan dari Al Qaida yang bertujuan mendirikan kekhalifahan Islam dengan basis Iraq dan Suriah.

Pada awal berdirinya tahun 2008, ISIS belum diperhitungkan sebagai kelompok teroris level internasional. Namun pada 2014 ISIS telah memproklamkan kekhalifahan Islam dan berhasil menguasai 58.372 km² (13% wilayah Iraq) dan 47.497 km² wilayah Suriah (25% wilayah Suriah). Mereka didukung oleh 6.3 juta penduduk Iraq dan 3.3 juta penduduk Suriah. (Seth G.Jones, et.al, 2017, h. 19). Keberhasilan. Mereka menggunakan internet untuk menarik simpati dan dukungan dari masyarakat di berbagai negara, dan menggunakan cara-cara teror untuk menghukum musuh-musuhnya. (Swarz dan Galily, 2016, h. 39162)

Gagasan kekhalifahan Islam dan keberhasilan ISIS menguasai sebagian Suriah yang dipimpin rezimShiah Basar 'Asaad juga menarik minat sebagian orang Indonesia. Jaringan ISIS di Indonesia dikomandani oleh Santoso (Abu Wardah) yang memusatkan gerakannya di Poso Sulawesi Tengah. Santoso melalui saluran youtube menyatakan kesetiiaannya terhadap terhadap negara Islam. (Sahrasad dan Al Chaidar, 2018, h. 13).

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, internet adalah sumber dimana ide-ide ISIS dikenal oleh masyarakat Indonesia. Mereka secara aktif memposting berita, artikel hingga video kegiatan dan pelatihan pasukan yang menggelorakan semangat untuk mendukung kekhalifahan Islam. Selain internet, paham negara Islam ISIS juga disebarkan oleh orang-orang Indonesia yang pernah menjadi anggota ISIS di Suriah dan Irak. Menurut perkiraan, ada sekitar 56 orang Indonesia bergabung dengan ISIS di Irak pada tahun 2013. Kebanyakan mereka memasuki Iraq dengan menggunakan paspor haji atau umrah. Dari ke 56 orang tersebut, 16 telah kembali ke Indonesia dan melakukan proses perekrutan di daerah masing-masing. Abu Wardah dan Aman Abdurahman adalah tokoh-tokoh utama penggerak dan perekrut pengikut-pengikut ISIS di Indonesia. (Tempo.co, 28 Oktober 2019).

Menurut riset yang dilakukan Karen Savitri (2018), ada dua faktor yang membuat ISIS didukung oleh sebagian orang Indonesia yaitu

faktor pendukung (internal) dan faktor daya tarik (eksternal). Faktor pendukung tidak lepas dari konsep ummah dan khilafah, Darul Islam dan bangkitnya pendukung Islam kanan seperti FPI, HTI dan MMI yang oleh pemerintah Indonesia dianggap menyebarkan propaganda untuk mendirikan negara Islam. Faktor-faktor eksternal yang menarik WNI untuk mendukung ISIS adalah penyebaran ajaran wahabi dan salafi di Indonesia yang didukung oleh Arab Saudi memunculkan lulusan-lulusan yang segaris dengan ideologi ISIS, serta ISIS menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai front kedua. (Savitri, 2018, h. 51)

3. Eksistensi Nasionalisme di Tengah Arus Globalisasi : Kasus Indonesia

Berdasarkan uraian diatas, globalisasi ibarat dewa Janus yang bermuka dua, yang bisa membawa kebaikan atau keburukan. (Rourke, 1989, h. 138). Globalisasi pada umumnya akan membawa dampak besar bagi negara-negara berkembang, karena negara-negara berkembang masih dengan mudah menerima pengaruh dari luar. Oleh karena itu, sejumlah perubahan yang terjadi akibat globalisasi menjadi tantangan bagi nasionalisme sebuah negara. Menurut Rothenberg, untuk memahami arti globalisasi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana nilai yang terkandung dan dianut oleh suatu negara dan apa yang berubah ketika terjadi globalisasi. Selanjutnya menurut Rothenberg terdapat tiga tekanan globalisasi terhadap negara-negara berkembang, yaitu pilihan individual melawan pilihan sosial, perdagangan bebas melawan intervensi pemerintah, dan otoritas lokal melawan otoritas supra-lokal. (Rothenberg, 2002-2003, h.1). Sedangkan Petru Dumitriu menyebutkan ada tujuh dosa-dosa globalisasi terhadap negara-negara berkembang, yaitu : alienasi, tindakan selektif, peminggiran/marginalisasi, cita rasa kolonial, beban berat pemerintah, serangan terhadap kedaulatan dan ancaman hilangnya identitas. (Dumitriu, 2000)

Indonesia, dengan beragam suku, agama, budaya, serta wilayah yang luas memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi arus globalisasi. Selama ini dasar negara Pancasila digunakan sebagai landasan

nasionalisme bangsa Indonesia. Pancasila pula yang dianggap sebagai jaminan akan keberagaman Indonesia. Namun sejak pemerintah Indonesia membuka diri bagi interaksi intensif dengan negara-negara dan organisasi-organisasi asing, maka proses globalisasi telah dimulai, dan sejak itu pula nasionalisme Pancasila menghadapi tantangan.

Dinamika keberagaman agama ini sangat berkaitan erat dengan peristiwa-peristiwa internasional, seperti munculnya gerakan ISIS di Iraq dan Suriah. Pada titik ini, globalisasi menjadi ancaman nyata bagi nasionalisme di Indonesia. Sekelompok warganegara dengan sengaja telah memindahkan loyalitasnya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ke sebuah entitas politik lain dan berjuang untuk entitas baru tersebut. Generasi muda (yang sering disebut sebagai Gen X, Gen Y atau Gen Z) merupakan kelompok rentan yang mudah tergerus rasa nasionalismenya. Intensitas pergaulan lintas batas negara melalui internet dan kontak-kontak langsung sedikit banyak mempengaruhi cara berpikir mereka dalam hal berbangsa dan bernegara. Jurgenmeyer mengemukakan argumentasinya bahwa negara-negara baru yang merdeka setelah Perang Dunia II seperti Indonesia, Pakistan, Iraq akan mengalami kesulitan besar dalam menghadapi tantangan globalisasi. Usaha untuk mempersatukan bangsa sejak 1945 tiba-tiba menghadapi ujian pada akhir abad 20, yaitu kemenangan paham liberal dan munculnya era transnasionalisme sebagai bagian dari proses globalisasi. Ikatan nasionalisme yang dengan susah payah dibangun bisa lepas dan terurai sebagaimana yang terjadi di Uni Soviet dan Yugoslavia. (Jurgenmeyer, 2019, h.3).

Tantangan globalisasi terhadap nasionalisme bukan faktor yang berdiri sendiri. Tantangan eksternal berkelindan dengan kondisi internal negara. Seperti dalam hal bidang ekonomi misalnya, ekonomi negara akan terancam karena nasibnya akan terkait dengan persoalan ekonomi negara lain atau perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) yang beroperasi secara global. Dalam pasar global, sebagaimana dikemukakan oleh Ohmae, individu-individu warganegara lebih tertarik dengan komoditas berkualitas tanpa

menghiraukan label kebangsaan. Dalam hal ini wewenang pemerintah dalam bidang ekonomi juga mengalami penurunan, dan jika pemerintah mengambil tindakan sepihak (unilateral) yang tidak sesuai dengan realita ekonomi internasional seperti nasionalisasi, proteksionisme atau berbagai regulasi ekonomi, maka pemerintah juga akan membayar mahal. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu akan menimbulkan upaya balasan (*reciprocity*) oleh negara lain. Sebaliknya apabila pemerintah terlalu memihak pada pasar global, maka pemerintah akan menjadi musuh bagi rakyatnya sendiri. Kebijakan ekonomi yang pro-pasar global membawa rentetan akibat salah satunya ekonomi berbiaya tinggi yang rentan terhadap dinamika ekonomi internasional. Pada tahap ini, masyarakat ekonomi lemah yang berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling menderita. Ketika hampir semua komoditi mengikuti harga pasar internasional, mereka terseok-seok untuk bertahan hidup dan menghadapi keputusasaan.

Dalam bidang politik, penyebaran nilai-nilai universal tentang demokratisasi dan hak asasi manusia telah meningkatkan kesadaran individu akan nilai-nilai tersebut. Ada kemungkinan bahwa akan muncul partai-partai dengan berbagai haluan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Namun dilema politik yang kemudian muncul adalah bahwa kelompok-kelompok politik yang tidak tertampung aspirasi politiknya akan menjadi kelompok marjinal secara politik. Kondisi-kondisi seperti keterpurukan ekonomi dan termarginalisasi secara politis adalah beberapa kondisi yang mendorong warganegara bersikap radikal. Dalam situasi seperti inilah tawaran untuk bergabung dengan organisasi ISIS dianggap sebagai jawaban atas semua permasalahan ketidakberdayaan tersebut. ISIS menjanjikan kehidupan dunia yang adil dan sejahtera, serta jaminan akhirat yang membahagiakan.

Meskipun banyak hal negatif dianggap sebagai ancaman globalisasi, perlu juga diakui bahwa globalisasi juga membawa dampak positif. Dampak positif globalisasi bagi Indonesia salah satunya adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang

lebih baik. Transparansi dengan e-government mulai diperkenalkan untuk meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan. Tata kelola pemerintahan yang transparan bisa digunakan untuk menarik minat investor asing dan kepercayaan rakyat juga akan meningkat. Bagaimanapun besarnya tantangan globalisasi, nasionalisme berbangsa dan bernegara perlu untuk dipertahankan. Bangsa ini telah mampu bertahan selama 75 tahun menghadapi berbagai gempuran dari dalam dan luar. Uni Soviet, Yugoslavia, Iraq dan Suriah layak dijadikan pelajaran bagaimana ikatan nasionalisme telah terurai dan bangsanya tercabik dalam perang saudara yang memakan ribuan korban jiwa.

KESIMPULAN

Who is us ? adalah pertanyaan yang layak diajukan melihat fenomena meluasnya interaksi umat manusia pada saat ini yang telah mengaburkan identitas kebangsaan. Identitas kewarganegaraan ratusan WNI yang tergabung dalam ISIS menjadi polemik dan nasionalisme mereka dipertanyakan. Mereka telah terhanyut akan tawaran kehidupan yang lebih menjanjikan oleh negara Islam yang merekrut warganegara dari seluruh penjuru dunia. ISIS sebagai organisasi bisa berkembang dengan pesat dalam arti penguasaan wilayah dan jumlah pendukung tidak lepas dari kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi. Pergerakan barang, jasa dan manusia beserta gagasan-gagasannya telah mengaburkan batas-batas fisik geografis negara-negara, sehingga sebagai sebuah entitas politik baru dengan mudah merekrut sekelompok warga negara menjadi warganegaranya.

Sebagai bangsa yang sedang berkembang, Indonesia menghadapi tantangan globalisasi terutama dalam hal nasionalisme yang tengah dibangun. Nasionalisme diperlukan sebagai pilar utama persatuan dan identitas bangsa. Pada satu sisi globalisasi telah membawa dampak positif dalam perkembangan tata kelola pemerintahan. Namun secara umum, bangsa Indonesia masih dalam kondisi rapuh untuk menghadapi arus globalisasi dengan segala aspeknya. Untuk itu beberapa agenda penting ekonomi dan politik layak

dipertimbangkan untuk tetap menegakkan rasa bangga dan identitas berbangsa dan bernegara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony Alcock, *A Short History of Europe : From the Greeks and Romans to the Present Day*, (London : Houndmills Macmillan Press, 1998)
- Baker, C., "What is Globalization", dalam John Beynon and David Dunkerley, *Globalization : The Reader*, Editors, (London : The Athlone Press, 2000)
- Bloom, William, *Personal Identity, National Identity and International Relations*, (Cambridge : Cambridge University Press, 1990)
- Coulombis, Theodore A. dan James H. Wolfe, *Introduction to International Relations : Power and Justice*, (New Jersey : Prentice Hall Inc, 1990)
- Dumitru, Petru, "The Seven Sins of Globalization : A Perspective from Small Countries, Perception : *Journal of International Affairs*, Vol.2, No. 2, 2000.
- Jones, Seth G., et.al, 2017, *Rolling Back The Islamic State*, RAND Corporation, 2017
- Juergensmeyer, Mark, "Religious Nationalism in a Global World", *Religions* **2019**, 10, 97, doi:10.3390/rel10020097)
- Lutz, Brenda J. dan James M. Lutz, "Globalisation and Terrorism in the Middle East", *Perspectives on Terrorism*, Vol. 9, No. 5, October 2015, pp. 27-46)
- Magenda, Burhan D. "Berbagai Aspek Globalisasi dan Pengaruhnya Pada Tata Hubungan Internasional", dalam *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 4, Nomor 3 April 2007
- Nye, Joseph S., *Understanding International Conflict : An Introduction to Theory and History*, Third Edition, (New York : Longman, 2000)
- Padelford, Norman J. dan George A. Lincoln, *The Dynamic of International Politics*, (New York : The Macmillan Company, 1962)

Rothenberg, Laurence E., The Three Tensions of Globalization, dalam *The American Forum For Global Education Journal*, No. 176, 2002-2003

Rourke, John T., International Politics on The World Stage, (Connecticut : The Dushkin Publishing Group, 1989)

Sahasrad, Herdi dan & Al Chaidar, “Indonesian Terrorist, ISIS, and Globalization of Terror: A Perspective”, *AHKAM Jurnal Ilmu Syariah*, ISSN: 1412-4734, Vol. 18, No. 1, 2018

Savitri, Karen, “Why Are Indonesian Prone to Support The Islamic State of Iraq and Syria ?”, *Verity Jurnal Ilmiah Hubungan Inernasional*, Vol. 10, No. 20, 2018

Schwarz, David dan Daniel Galily, “ Review Article : ISIS, A New Definition of Terrorism”, *International Journal of Current Research*, Vol. 8, Issue, 09, pp.39161-39162, September, 2016, hal. 39162

Tempo.co, 5 Februari 2020,
<https://nasional.tempo.co/read/1303762/jimly-asshiddiqie-sarankan-paspor-wni-eks-isis-dicabut/full/view=ok>

CNN Indonesia, 7 Februari 2020
<https://m.cnn.indonesia.com/nasional/20200207181615-20-472710/status-wni-isis-bakar-paspor-jubir-wapres-ksp-beda-pendapat?>

CNN Indonesia, 8 Februari 2020
<https://m.cnn.indonesia.com/nasional/20200208024203-20-472780/pengamat-sebut-anak-wni-eks-isis-belum-tentu-bersalah>.

(Tempo.co, 28 Oktober 2019).